

BAB II

2.1 Keadaan Nepal Di Bawah Sistem Pemerintahan Monarki

Di dalam Bab II penulis akan mendeskripsikan dengan singkat tentang keadaan Nepal di bawah pemerintahan monarki sebelum menjadi negara republik seperti saat ini. Isi dari bab ini akan di mulai dari penjabaran singkat sejak negara Nepal disatukan menjadi sebuah negara yang awalnya hanya terdiri dari etnis-etnis kecil yang tersebar di dataran Nepal hingga terjadinya revolusi pemerintahan pada tahun 2008 yang menghapus sistem kerajaan secara menyeluruh.

2.2 sejarah singkat kerajaan Nepal Sebelum Tahun 1951

Nepal sebelumnya merupakan wilayah yang terdiri dan terbentuk dari berbagai macam etnis, kelompok, dan kerajaan-kerajaan kecil yang terpencar di dataran tinggi himalaya. Nepal disatukan oleh kerajaan gorkha yang saat itu menjadi kekuatan dominan di regional tersebut. Kerajaan gorkha menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan kelompok-kelompok etnis menjadi sebuah negara yang sekarang kita kenal dengan Nepal. Dalam menyatukan kerajaan-kerajaan kecil dan kelompok-kelompok etnis tersebut, kerajaan gorkha tidak selalu menggunakan kekerasan dan kekuatan militer, namun juga dengan cara persuasif untuk meyakinkan kerajaan-kerajaan kecil dan kelompok-kelompok etnis tersebut mau bergabung di bawah satu kesatuan komando kerajaan gorkha. Cara-cara kekerasan hanya digunakan ketika perundingan damai dengan cara persuasif tidak berjalan lancar.

Kerajaan Nepal hanya mampu bertahan selama 2 abad sejak berdirinya kerajaan tersebut mulai dari tahun 1798 hingga hilangnya kekuasaan kerajaan padah revolusi tahun 2008 yang menyatakan bahwa sejak saat itu negara Nepal merupakan negara republik yang demokratis.

Nepal tidak hanya pernah diperintah oleh seorang raja, namun juga oleh seorang perdana menteri yang mengepalai pemerintahan. Ketika kewenangan pemerintah di bawah kendali seorang perdana menteri, keluarga kerajaan hanya dianggap sebagai simbol negara yang tanpa kekuasaan untuk memerintah. Penulis akan menjabarkan secara singkat sejarah tersebut pada sub bab berikut.

2.2.1 Pemerintahan di Era Dinasti Shah

Nepal modern bermula tahun 1559 ketika Dravya Shah mendirikan kerajaan Gorkha di Nepal bagian barat. kerajaan ini berdiri dari gabungan atau penyatuan kerajaan-kerajaan dan kelompok-kelompok etnis kecil. Davya Shah sebelumnya ialah seorang raja dari kelompok etnis Magar yang mendominasi dengan memenangi pertempuran dan menaklukkan kerajaan-kerajaan sekitarnya. Di kemudian hari, Raja Ram Shah melanjutkan perluasaan kerajaan Gorkha dengan membentuk aliansi dengan kerajaan-kerajaan yang tersebar di lembah Kathmandu. dia memperkenalkan beberapa reformasi penting di masa pemerintahannya, di antaranya ialah reformasi tentang penghapusan bea cukai dan hukuman mati. dia juga memperkenalkan standar pengukuran baru untuk jarak dan berat serta teknologi irigasi bagi desa-desa terpencil di sekitarnya.¹⁰

¹⁰ Krishna P. Bhattarai, 2008, *Modern World Nations: Nepal*, New York: Chelsea House, hal. 36.

Pada tahun 1742, Prithvi Narayan Shah naik tahta menjadi raja di kerajaan Gorkha menggantikan ayahnya Narabhupal Shah. Dia menggunakan kekuasaannya dengan bijaksana, dan dia juga menjalankan program yang ambisius untuk menyatukan banyak kerajaan-kerajaan kecil di bawah satu kerajaan. Dia mendirikan beberapa barak militer dan melatih tentara-tentaranya dalam menggunakan persenjataan modern untuk memuluskan rencananya menyatukan kerajaan-kerajaan di wilayah tersebut.¹¹

Sebelum melakukan penaklukan, ia mula-mula berusaha untuk membentuk dan mengembangkan aliansi dengan negeri-negeri tetangganya, namun jika tawaran beraliansi itu gagal, maka ia akan menyerang kerajaan tersebut. Kerajaan Gorkha menerapkan strategi blokade, di mana mereka menutup semua rute perdagangan sebuah negara yang menentang keinginan mereka. Dengan demikian, musuh-musuh mereka hanya memiliki dua pilihan; kelaparan atau menyerah pada kehendak Gorkha.

Secara historis, Prithvi Narayan Shah terkenal dengan pedoman dan tuntunan bernegara yang ia turunkan pada penerusnya. Salah satu yang paling terkenal hingga saat ini ialah *divyopadesh* yang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti *Nasehat Ilahi*. Nasehat-nasehatnya mengandung petunjuk bagi mereka yang bertanggungjawab terhadap pembentukan kebijakan luar negeri maupun pembangunan dalam negeri. Perkataanya yang paling populer ialah “*Nepal adalah ubi di antara dua batu*”

¹¹ *Ibid*, hal. 37.

Prithvi Narayan Shah menyadari bahwa lokasi Nepal tepat berada di antara dua negara besar yang kuat saat itu (British India dan Cina) yang menempatkan negaranya dalam bahaya dan terancam. Dia menghimbau agar menjaga keseimbangan dan menjalin hubungan persahabatan antara Nepal dan negara-negara tetangganya yang menjadi faktor inti dalam menjaga kedaulatan nasional.¹²

Menurut Shiv Bahadur Singh, masyarakat Nepal setelah penyatuan Nepal terdiri dari beberapa kelompok kecil, terisolasi, dan homogen yang anggotanya cenderung fanatik terhadap aturan adat mereka sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat.¹³ pada masa-masa awal itu, Nepal lebih cenderung kepada sistem pemerintahan tradisional alih-alih menganut sistem pemerintahan yang demokratis. Di Nepal, kekuasaan dinasti Shah dan dinasti Rana bisa dikatakan sangat menikmati kekuasaan mereka di mana kekuasaan mereka didukung penuh oleh aturan agama dan norma-norma tradisional yang dianggap sakral tanpa harus mendengarkan aspirasi rakyatnya.¹⁴ Satish Kumar menegaskan bahwa dalam rangka konsolidasi kekuasaan mereka, para penguasa Shah mengandalkan istana dan empat *Kaji*.¹⁵ Mereka adalah orang-orang kepercayaan raja dan bertindak sebagai sebuah kabinet yang secara kolektif bertanggung jawab kepada kerajaan untuk administrasi sipil dan militer negara itu.¹⁶ Untuk menjaga posisinya di singgasana kekuasaan, para penguasa dinasti Shah mengatur dan bahkan menyingkirkan pejabat kerajaan yang dianggap sebagai ancaman dan tidak sejalan

¹² *Ibid*, hal. 38.

¹³ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 27.

¹⁴ *Ibid.*, hal. 29.

¹⁵ *Kaji* adalah gelar yang diberikan oleh raja untuk kasta spesial di kerajaan.

¹⁶ Satish Kumar, 1962, "The Nepalese Monarchy from 1769 to 1951," *International Studies*, hal. 49.

dengan kepentingan sang penguasa. Para pejabat-pejabat kepercayaan raja tersebut tidak dipilih dan juga tidak mewakili aspirasi rakyat kerajaan dikarenakan tidak adanya komunikasi langsung antara penguasa (raja-raja) dan rakyatnya. Sebagai pejabat kerajaan, mereka tidak bertanggung jawab kepada rakyat, nasehat mereka untuk sang raja tidak ada sangkut pautnya dengan aspirasi rakyat saat itu.¹⁷

2.2.2 Pemerintahan di Era Dinasti Rana

Era Rana di Nepal (1846-1951) adalah masa di mana pemerintahan negara Nepal berada di bawah kontrol dan kekuasaan keluarga atau dinasti Rana. Jung bahadur merebut kekuasaan atas pemerintahan Nepal pada tahun 1846 dan menjadikan dirinya sebagai seorang perdana menteri seumur hidup. Di bawah pemerintahan dinasti Rana, Nepal menjalin hubungan baik dengan inggris yang memberikan mereka dukungan untuk tetap berkuasa di Nepal. Ketika inggris menarik diri dari india pada tahun 1947, dinasti Rana dihadapkan pada bahaya baru. Mereka menghadapi revolusi pada tahun 1950, dan pada tahun 1951, di bawah tekanan dari india akhirnya keluarga Rana mengakhiri kekuasaan mereka dan menyerahkan segala kekuasaan pada raja Nepal saat itu tribhuvan yang mengambil alih pemerintahan dan kedaulatan secara penuh.¹⁸

Kediktatoran Rana yang berlangsung selama 104 tahun (1846-1951), dapat dikatakan sebagai sebuah kemunduran bagi demokrasi dalam sejarah Nepal. Ramjee P. Parajulee berpendapat bahwa pencetus dan perdana menteri pertama dari rezim Rana, Jung Bahadur Rana, berusaha untuk mengkonsolidasikan

¹⁷ Ibid., 52

¹⁸ <https://www.britannica.com/event/Rana-era#ref1123325> diakses pada 16/05/2019 10:40

kekuasaannya dengan membersihkan ratusan lawan dan saingan dan menunjuk saudara dan kerabatnya ke berbagai jabatan strategis politik dan militer.¹⁹ Louise Brown juga menyebutkan bahwa Jung Bahadur dan penerusnya diyakini telah menguasai kegiatan bebas di pemerintahan dan mereka juga mengarahkan dan membimbing para putra mahkota dengan mengajak mereka terlibat dalam apa yang dia sebut sebagai “pesta pora pada usia dini dan mudah dipengaruhi.” Rana melakukan semua kegiatan ini untuk menjauhkan para putra mahkota dari politik. Pada 1847, para Rana mengambil alih kekuasaan eksekutif di negara itu, dan raja-raja Shah hanya diperlakukan sebagai simbol negara belaka.

Sebagaimana dijelaskan oleh Leo E. Rose dan John T. Scholz, rezim Rana berpusat pada politik keluarga; mereka mengumpulkan dukungan dari British East India Company di India sehingga otokrasi mereka tidak bisa ditentang oleh rakyat di Nepal.²⁰

Bahkan jika ada orang yang berani melawan aturan Rana, mereka akan dengan mudah dihancurkan oleh para penguasa, yang didukung dan dibantu British oleh East India Company.²¹ Inggris memilih untuk mendukung keluarga Rana karena mereka khawatir bahwa perjuangan internal atau gerakan demokrasi di Nepal mungkin meluas ke India, di mana rakyat mungkin menentang kekuasaan Inggris di India.²²

¹⁹ Ramjee P. Parajulee, 2000, *The Democratic Transition in Nepal*, Inggris: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., hal. 32.

²⁰ Rose dan Scholz, 1980, *Nepal: Profile of a Himalayan Kingdom*, Colorado: Westview Press Inc., hal. 28-29.

²¹ Ibid.

²² Ibid., hal .30-31.

Rose dan Scholz mencatat bahwa secara internal, keluarga Rana berfokus pada suksesi perdana menteri dan posisi-posisi penting pemerintahan lainnya yang berasal dari kalangan mereka sendiri karena mereka mengklasifikasikan diri dalam kategori A, B, dan C.²³ Divisi ini diprakarsai oleh penguasa dari keluarga Rana, yang mengelompokkan dirinya menjadi kelas A (elite). Rana lainnya jatuh ke kelas B (menengah) dan kelas C (rendah). Hirarki ini dimaksudkan untuk menjaga penerus untuk perdana menteri hanya untuk kelas A Rana atau keluarga penguasa Rana.²⁴ Selain itu, S.C. Lohani menegaskan bahwa pemerintahan rezim Rana dan ambisi politiknya diyakini sebagai pionir feodalisme di Nepal saat itu. Akibatnya, dampak politik kekuasaan berpusat adalah terhambatnya bidang ekonomi, sosial, dan politik Nepal.²⁵

2.3 Demokrasi Di Nepal Setelah 1951

Sebagaimana dijelaskan oleh Brown bahwa tidak ada pendidikan formal atau kegiatan politik yang bebas selama pemerintahan aktif Keluarga Shah dan terlebih lagi selama pemerintahan Rana, Nepal seakan-akan tekurung dalam “kapsul waktu” di mana sebuah negara baru muncul ke permukaan pada tahun 1951 sama sekali tidak siap untuk menghadapi dunia modern.”²⁶ Oleh karena itu, sebagaimana yang diteliti oleh Brown, ditemukan bahwa landasan demokrasi Nepal tidak pernah bebas dari sistem penguasa lama, bahkan jika ada gerakan demokrasi, mereka hanya mengubah aktor, bukan sistem itu sendiri.²⁷ Akibatnya, negara

²³ Ibid., hal. 32.

²⁴ Ibid.

²⁵ C. Lohani, 1989 “*The Birth of Rana Feudalism in Nepal*,” *Ancient Nepal*, hal. 49.

²⁶ T.Louise Brown, 1996, “*The challenge to democracy in Nepal*,” *A political history*, London: Routledge, hal. 13.

²⁷ Ibid., 23–24.

mengalami berbagai bentuk situasi politik yang tidak stabil bahkan setelah demokrasi singkat terwujud pada tahun 1951.

2.3.1 Perubahan Politik dan Partai Politik

Akhir oligarki Rana pada tahun 1951 membuka pintu bagi praktek demokrasi dalam politik Nepal. Parajulee menyatakan bahwa perundingan tripartit antara Raja, Kongres Nepal, dan Rana memberikan peluang bagi perubahan politik di negara itu.²⁸ Demikian pula, Singh berpendapat bahwa selama waktu yang sama, “Raja Tribhuvan, disertai oleh para pemimpin penting dari Kongres Nepal (Kongres Nepal) dan Mukti Sena,²⁹ menguasai Kathmandu dan menjadi Raja demokratis pertama dari Nepal.”³⁰ Parajulee menegaskan bahwa meskipun pembicaraan tripartit dipandang sebagai “kompromi Delhi,” karena mereka ditengahi oleh India, sesi ini tidak diragukan lagi akan memberikan perubahan demokratis di Nepal.³¹ Setelah tahun 1951, ada tiga aktor utama yang menonjol, yang secara politik mempengaruhi entitas kongres Nepal dalam perpolitikan Nepal: monarki, Kongres Nepal, dan Rana. Ketiga entitas ini mewakili tiga kepentingan yang berbeda dari masyarakat. Brown mencatat bahwa monarki sempat disingkirkan oleh Rana, tapi dengan status agama khusus dalam mitologi Hindu, mereka mampu merebut kembali kekuasaan politik kerajaan di Nepal.³²

²⁸ Ramjee P. Parajulee, 2000, *The Democratic Transition in Nepal*, Inggris: Rowman & Littlefield Publisher, IKongres Nepal., hal. 40.

²⁹ Mukti Sena adalah tentara pembebasan yang dibentuk oleh Kongres Nepal.

³⁰ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 54.

³¹ Loc. Cit.

³² T.Louise Brown, 1996, “*The challenge to democracy in Nepal*,” *A political history*, London: Routledge, hal. 23.

Namun, Rana yang mewakili kelas feodal, tidak bisa benar-benar dijatuhkan oleh gerakan anti-Rana. Oleh karenanya, Brown mengungkapkan: “alih-alih disebut sebagai revolusi, akan lebih tepat jika dikatakan Nepal hanya mengalami 'restorasi' disertai dengan *reshuffle elit*.”³³ Dengan demikian, Rana tetap menempati lingkaran politik yang berpengaruh bahkan setelah aturan formal mereka berkurang. Demikian pula yang terjadi dengan Kongres Nepal yang dipimpin rezim anti-Rana bersenjata, yang mewakili aspirasi revolusioner rakyat.³⁴ Dengan tiga entitas politik tersebut mewakili tiga kepentingan spesifik masyarakat, oleh sebab itu, konflik kepentingan di masa yang akan datang bisa dipastikan tidak bisa dihindari. Untuk menghindari konflik menjulang di antara pemangku kepentingan politik utama, Parajulee menjelaskan bahwa India dan Raja Tribhuvan meminta Rana dan Kongres Nepal untuk bekerjasama.³⁵ Namun, kerjasama semacam itu tidak akan mungkin bisa bertahan untuk jangka waktu lama.

Perselisihan antara para petinggi Rana dan pihak Kongres Nepal meningkat karena kedua belah pihak memiliki kepentingan politik dan sosial yang berbeda. Dengan kata lain, sistem politik Nepal itu terfragmentasi sejak awal dalam hal praktek-praktek demokrasi.

Walau bagaimanapun, dengan berkembangnya demokrasi, partai politik Nepal untuk pertama kalinya secara bebas menjalankan partai politik setelah 104 tahun di bawah pemerintahan otokratis. Dengan perubahan sistem politik di negara itu, Singh menyatakan bahwa Kongres Nepal menawarkan beberapa reformasi

³³ Ibid.

³⁴ Ramjee P. Parajulee, 2000, *The Democratic Transition in Nepal*, Inggris: Rowman & Littlefield. Hal. 40.

³⁵ Ibid.

politik, misalnya, “penegakan hukum dan ketertiban, pembentukan *Panchayat*, dan penyebaran merata pendidikan serta program kesejahteraan lainnya.”³⁶

Lebih jauh, Parajulee mencatat bahwa untuk mengarahkan negara ke arah demokrasi dengan seperangkat aturan tetap, Nepal melewati aturan pemerintahan sementara negara tersebut.³⁷ Masa-masa ini dianggap sebagai awal mula praktek demokrasi di Nepal.

Partai-partai politik, terutama Kongres Nepal, menjadi pusat perhatian karena mereka memimpin gerakan anti Rana. Orang percaya bahwa Kongres Nepal akan mempengaruhi perubahan politik, sosial, dan ekonomi. Bhuwan Chandra Upreti mencatat bahwa Partai Komunis Nepal (CPN), yang menentang perjanjian Delhi, ingin reformasi lebih diimplementasikan di Nepal.³⁸ Namun pada kenyataannya, polarisasi ideologi politik sentris dan sayap kiri memperkeruh politik Nepal tepat setelah negara itu mendapatkan demokrasi pada tahun 1951.³⁹ Sebagai para pemangku kepentingan politik selama periode itu, mereka berfokus pada konsolidasi kekuasaan yang menjadikan situasi politik negara memburuk. Dalam keadaan seperti itu, norma-norma demokrasi di negara itu tidak dapat diterapkan.

2.3.2 Perselisihan Antara Istana dan Parlemen

Meskipun demokrasi menggantikan rezim otokratis rana, dan demokrasi itu dimaksudkan untuk menjadi tujuan raja dan partai politik, akan tetapi kenyataannya tidaklah sesuai. Kekuasaan politik yang berpusat menjadikan situasi politik negara

³⁶ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 54.

³⁷ Op. Cit., hal. 41.

³⁸ Bhuwan Chandra Upreti, 2008 *Maoists in Nepal: From Insurgency to Political Mainstream* Delhi, India: Kalpaz, hal. 15.

³⁹ Ibid.

tidak stabil. Kekuasaan politik terpusat seperti itu lebih fokus untuk memantapkan posisi mereka daripada untuk memberikan layanan demokratis kepada masyarakat. Dalam situasi seperti ini sebagaimana dikutip rose dan scholz, ada perselisihan antara istana dan parlemen dalam politik Nepal.⁴⁰ einsiedel, malone, dan pradhan menggambarkan permainan kekuasaan ini: “kerajaan melegitimasi dan merebut kekuasaannya kembali tidak hanya dari dinasti rana yang masih memiliki pengaruh, akan tetapi juga dari partai-partai politik yang baru lahir dan idealis.”⁴¹ sebagai tambahan, seperti dikutip parajulee, deklarasi raja tribhuvan tentang kekuasaan monarki absolut pada 13 februari, 1954, lebih jauh menegaskan bahwa meningkatnya permintaan politik dari istana di perpolitikan Nepal.⁴²

Keretakan di antara partai-partai politik dan yang paling terlihat adalah kongres Nepal, memberanikan raja mengambil tindakan untuk memperkuat posisinya.⁴³ inilah yang menurut Einsiedel, Malone, dan Pradhan menjadi sebab adanya penundaan dalam pelaksanaan pemilu.⁴⁴ Politik kekuasaan berpusat ini tidak memungkinkan untuk penyelesaian masalah dasar rakyat yang terkait dengan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan yang harusnya menjadi prioritas utama pemerintahan yang baru sesuai dengan harapan rakyat.

⁴⁰ Rose dan Scholz, 1980, *Nepal: Profile of a Himalayan Kingdom*, Colorado: Westview Press Inc., hal. 47.

⁴¹ Sebastian von Einsiedel, David M. Malone, and Suman Pradhan, 2012, *Nepal in Transition: From People's War to Fragile Peace* New York: Cambridge University Press, hal. 6.

⁴² Ramjee P. Parajulee, 2000, *The Democratic Transition in Nepal*, Inggris: Rowman & Littlefield. Hal. 42.

⁴³ Ibid., hal. 41.

⁴⁴ Loc. Cit.

2.3.3 Pemilihan Parlemen Pertama Nepal

Demokrasi yang masih baru diaplikasikan di negara itu, membuat harapan masyarakat terhadap partai politik menjadi sangat besar. Meskipun butuh delapan tahun, keyakinan optimis orang-orang Nepal terhadap demokrasi sangatlah besar dalam pelaksanaan pemilihan umum parlemen pertama negara itu pada 18 Februari 1959 yang berlangsung dengan baik.⁴⁵ Hasil pemilu mengubah ketimpangan dalam hal politik yang selama ini terjadi. Partai-partai politik yang berjuang melawan oligarki Rana ikut berkontestasi ke politik Nepal dengan dukungan rakyat. Singh menyoroti bahwa Kongres Nepal memenangi mayoritas di parlemen saat itu dengan mendapatkan 74 dari 109 kursi, sedangkan partai Gorkha Parishad menang 19 kursi, dan Partai Komunis Nepal menang hanya empat kurs.⁴⁶

Dalam jangka pendek delapan tahun, banyak partai politik Muncul dalam politik Nepal. Hal ini juga mengisyaratkan bahwa untuk negara seperti Nepal tidak akan mudah untuk memiliki situasi politik yang stabil dengan begitu banyak partai politik dan berbagai agenda mereka. Bisa dipastikan masa depan demokrasi di Nepal setelah pemilu masa itu terlihat lebih menantang.

Hasil pemilu yang telah berlangsung membuat raja tidak senang, sebagaimana diungkapkan oleh Singh, Perdana Menteri terpilih pertama saat itu Nepal, B.P. Koirala, pada pidato kemenangan partainya bahwa dia akan “meletakkan mahkota kerajaan di museum”.⁴⁷ Di tengah ketegangannya dengan raja ini, dan dengan begitu banyaknya partai politik yang berbeda saling berebut

⁴⁵ Sebastian von Einsiedel, David M. Malone, and Suman Pradhan, 2012, *Nepal in Transition: From People's War to Fragile Peace* New York: Cambridge University Press, hal. 6.

⁴⁶ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 27.

⁴⁷ Ibid., hal. 99.

simpatisan, pemerintah Kongres Nepal akan sangat sulit untuk melaksanakan reformasi penuh seperti yang diharapkan.⁴⁸

Rose dan Scholz menjelaskan bahwa Kongres Nepal menunjuk anggota mereka sendiri sebagai cabang-cabang “pembangunan birokrasi” yang menyalurkan dana pembangunan langsung ke daerah-daerah, tanpa melewati kontrol dari birokrat pusat yang berwenang, yang sebagian besar dari mereka masih setia ke istana.⁴⁹

Selain agenda reformasi sosial, menurut Rose dan Scholz, partai Kongres Nepal setelah berkuasa terfokus pada menjaga pejabat administrasi jauh dari istana.⁵⁰ Tindakan ini dilakukan dalam rangka upaya untuk mengurangi peran intervensi istana dalam politik Nepal dan untuk mempromosikan sistem demokrasi di mana birokrat akan bertanggungjawab secara langsung terhadap rakyat.⁵¹ Keputusan yang berkaitan dengan reformasi sosial dan birokrasi tidak menjadi sepopuler seperti yang diharapkan, salah satu penyebabnya adalah karena hal tersebut masih baru dalam sistem Nepal, penyebab lainnya adalah karena orang-orang yang diuntungkan dari status sosial feodal lama selama berabad-abad yang kehilangan hak-hak mereka. Oleh karena itu, pemerintah yang terpilih secara demokratis pertama di Nepal tidak memiliki lingkungan pemerintahan yang bagus. Parajulee menegaskan bahwa keputusan pemerintah tidak disukai oleh kelompok

⁴⁸ Ibid., hal. 102-103.

⁴⁹ Rose dan Scholz, 1980, *Nepal: Profile of a Himalayan Kingdom*, Colorado: Westview Press Inc., hal. 48.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid., hal. 48.

yang kuat dalam masyarakat, yaitu Rana, tuan tanah, dan pemegang *Birta* (konglomereat).⁵²

Meskipun reformasi pemerintah bertujuan untuk membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat, reformasi tersebut justru memprovokasi kekerasan dan pelanggaran hukum.⁵³ Selain itu, Singh berpendapat bahwa para pekerja partai Kongres Nepal di tatanan bawah juga tidak puas dengan partai mereka.⁵⁴ Tiga partai oposisi; Nepal Praja Parishad (NPP), Partai Demokrat bersatu (UDP), dan Prajatantrik Mahashaba (PM) memutuskan untuk membentuk Forum Demokrasi Nasional.⁵⁵

Dalam keadaan seperti itu, pemerintah terpilih pertama Nepal menghadapi tantangan dari dalam dan luar partai. Sebagaimana diuraikan oleh Singh, setelah pemilihan parlemen pertama Nepal, Raja Mahendra pada tanggal 15 Desember 1960, memberhentikan pemerintah terpilih, melarang partai politik, dan menghapus dari rakyat tentang hak-hak dasar mereka dan kebebasan mereka, termasuk memasukkan Perdana Menteri terpilih pertama Nepal B.P. Koirala ke penjara.⁵⁶ Dengan kejadian ini, pemilu pertama kalinya parlemen Nepal dan praktek demokrasi singkatnya tiba-tiba berakhir dengan pengambilalihan kekuasaan oleh kerajaan pada tahun 1960.

⁵² Ramjee P. Parajulee, 2000, *The Democratic Transition in Nepal*, Inggris: Rowman & Littlefield Publisher, Inc., hal. 41.

⁵³ Ibid., hal. 48.

⁵⁴ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 100.

⁵⁵ Ibid., hal. 99.

⁵⁶ Shiv Bahadur Singh, 2007, *Nepal: Struggle for Democracy*, Delhi: Adhyayan, hal. 102.